



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Telepon (021) 859100 31, Faksimile (021) 859100 30

E-mail: humas@bpkp.go.id

SIARAN PERS

Mendagri dan BPK Apresiasi Sertifikasi CGCAE BPKP

Jakarta (01/02) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan sertifikasi CGCAE atau *Certified of Government Chief Audit Executive* angkatan kedua guna meningkatkan profesionalitas pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menghadapi tantangan perubahan.

Dalam pembukaan program sertifikasi tersebut, BPKP menganugerahkan sertifikat CGCAE kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam membangun pengawasan intern. Penganugerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Senin (01/02).

Dalam sambutannya, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program sertifikasi ini penting dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pimpinan APIP utamanya, dalam pencegahan korupsi dan peringatan dini atau *early warning system* bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

"Pemantauan yang kami lakukan, masih terdapat 150 APIP yang jumlah auditornya kurang dari 10 orang, dan terdapat 248 APIP yang masih perlu ditingkatkan kualifikasi profesionalnya," katanya.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa peran auditor semakin lama semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas (*oversight*) saja, namun ada pekerjaan sebagai konsultan (*insight*), dan juga memproyeksikan permasalahan ke depan (*foresight*).

"Peran auditor menjadi semakin kompleks, terutama dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, bagaimana cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mengefisiensikan belanja pemerintah".

Tito memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP dan segenap jajaran atas inisiatif pelatihan ini semoga dapat meningkatkan integritas jajaran pengawasan intern. Tito juga mengajak seluruh pimpinan APIP daerah agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga marwah pengawasan intern akan terangkat.

"Siapa lagi yang akan mengangkat marwah pengawasan intern, jika bukan dari dalam pengawasan intern itu sendiri", pungkasnya.

Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar juga memberikan apresiasi, serta berpesan bahwa semakin baik kualitas pengawasan oleh APIP, maka akan memudahkan dalam pemeriksaan oleh auditor ekstern.

"Sehingga sinergi dan kolaborasi antara auditor intern dan pemeriksa ekstern dibutuhkan utamanya untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara".

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar APIP meningkatkan kualitas pengawasan intern, sehingga dapat melakukan pengawalan secara optimal atas akuntabilitas tata Kelola keuangan serta penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi
ttd.

Eri Satriana